

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN INVESTASI
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Andreas Justinus Waikelak
130810351**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN INVESTASI
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Andreas Justinus Waikelak
130810351**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Andreas Justinus Waikelak
130810351

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN INVESTASI
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BATAM**

Oleh:

Andreas Justinus Waikelak

130810351

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**Baru Harahap, S.E.,M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan analisis Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio belanja modal, dan Investasi pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota Batam. Jenis penelitian statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) Rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam, dimana dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} -0,243 < t_{tabel} 1,66629$ dan signifikansi $0,809 > 0,05$, selanjutnya Rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam, dimana di lihat dari nilai $t_{hitung} 7,420 < t_{tabel} 1,66629$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, dan Investasi pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam, dimana dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} -5,990 < t_{tabel}$ sebesar $1,66629$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan secara Simultan (Uji F) seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota Batam dengan angka signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio belanja modal, Investasi pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to analyze the government's financial performance using the analysis of regional financial efficiency ratio, ratio of capital spending and government investment to economic growth in the city of Batam. This type of research descriptive statistics. The results of this study showed that partially (t test) regional financial efficiency ratio does not significantly influence economic growth in the city of Batam, which can be seen from the value $t_{hitung} -0.243 < t_{tabel} 1.66629$ and significance $0.809 > 0.05$, then the ratio of spending berpengaruh capital significantly to economic growth in the city of Batam, which in view of the value $t_{hitung} 7.420 < t_{tabel} 1.66629$ and significance of $0.000 < 0.05$, and government investment is also significant effect on economic growth in the city of Batam, which can be seen from the value $t_{hitung} - 5.990 < t_{tabel} \text{ of } 1.66629$ and significance $0.000 < 0.05$. While the Simultaneous (Test \bar{F}) all independent variables significantly influence economic growth in the city of Batam with figures of significance $0.000 < 0.05$.

Keywords: Regional Financial Efficiency Ratio, Ratio of Capital Expenditure, Government Investment, Economic Growth

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Baru Harahap, S.E.,M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Orang tua dan Keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan nasihat dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung dan penyemangat dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR RUMUS.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar	10
2.1.1 Kinerja.....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan.....	12
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah	12
2.1.4 Investasi	17
2.1.5 Investasi Pemerintah	18
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Operasional Variabel	31
3.2.1 Variabel Independen.....	31
3.2.2 Variabel Dependen	32
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.3.1 Populasi	32
3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33

3.5	Metode Analisis Data	33
3.5.1	Metode Analisis Statistik Deskriptif	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	34
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	34
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas.....	35
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	35
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	36
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.5.4	Uji Hipotesis	37
3.5.4.1	Uji t	38
3.5.4.2	Uji F	38
3.5.4.3	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	39
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	39
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	39
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	42
4.1.2.1	Uji Normalitas.....	43
4.1.2.2	Uji Multikolinieritas	46
4.1.2.3	Uji Autokorelasi	47
4.1.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.1.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
4.1.4	Uji Hipotesis	51
4.1.4.1	Uji t	51
4.1.4.2	Uji F	52
4.1.4.3	Uji Koefisien Derterminasi (R^2).....	53
4.2	Pembahasan.....	55

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan	60
5.2	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas.....	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (t test).....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (F test)	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis Investasi Pemerintah	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	45
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	15
Rumus 2.2 Rasio Belanja Daerah	17
Rumus 3.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

Lampiran 2 Laporan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Batam

Lampiran 3 Laporan Neraca Pemerintahan Kota Batam

Lampiran 4 Tabel Rekap Perhitungan

Lampiran 5 Output SPSS

Lampiran 6 Tabel t

Lampiran 7 Tabel F

Lampiran 8 Tabel Durbin-Watson

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah mengupayakan agar kebijakan maupun peraturan yang berlaku dapat memberikan kenyamanan kepada setiap individu untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan iklim perekonomian yang semakin baik. Untuk menilai kebijakan pemerintah, haruslah didasarkan pada pengaruh dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap alokasi sumber daya yang dihasilkan oleh perekonomian (Rahardjo, 2011:13).

Alokasi sumber daya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai pelayanan umum dan pembangunan secara berkelanjutan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan akan dapat mencapai kehidupan yang makmur. Pembiayaan memerlukan dana atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Anggaran pemerintah daerah dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Dalam penyusunan APBD, anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, agar pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemerintah. Sistem pengelolaan anggaran disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Baik atau tidaknya hasil yang dicapai oleh pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran, dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun diwujudkan dalam anggaran (APBN/APBD). Bagi pemerintah anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintah dan pertanggungjawaban (Muindro, 2010: 8).

APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, setiap pimpinan dari masing-masing kementerian/lembaga (pada pemerintah pusat) dan pimpinan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (pada pemerintah daerah) untuk melaksanakan pengelolaan dibidang keuangan diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (I Gusti, 2010:16).

Sebagaimana kegiatan pengelolaan keuangan Negara/Daerah, sistem pengelolaan keuangan Negara/Daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD. Berdasarkan persetujuan DPRD kota Batam dan Walikota Batam menetapkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 yang dimaksudkan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan anggaran dalam UU Keuangan Negara ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, keuangan Negara disebutkan bahwa belanja Negara/Daerah dirinci samapai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

dan jenis belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Salah satu jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah anggaran belanja modal, yang dijabarkan dalam rasio belanja modal yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor-sektor ekonomi (Mafizatun dalam jurnal). Investasi sangat bermanfaat untuk jangka menengah serta jangka panjang. Salah satu cara memanfaatkan *Surplus* anggaran dengan melakukan investasi sehingga dapat membantu peningkatan kebutuhan pemerintah untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang belum dicapai, sehingga tata kelola birokrasi yang diinginkan bersama baik pemerintah maupun masyarakat dapat tercapai. Hal ini menunjukkan investasi pemerintah daerah memberikan pengaruh atau dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan oleh Mafizaton Nurhayati (2015).

Tata kelola yang baik (*good governance*) menurut World Bank mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Upaya untuk menciptakan penyelenggaraan *good governance* pemerintahan Kota Batam melaksanakan birokrasi satu pintu terpadu dalam upaya memperbaiki sistem kinerja.

Menurut Moeheriono (2010:61) pengertian atau definisi kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sehingga implementasi birokrasi *good governance* memberikan hasil kerja yang nyata pada aspek politik, ekonomi, dan administratif.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), *political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*), *economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis kinerja keuangan dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Menganalisa Kinerja Keuangan dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi disetiap daerah di Indonesia ini, secara khusus pada Pemerintahan Kota Batam, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.
2. Bagaimana pengaruh rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.
3. Bagaimana pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada Analisis Kinerja keuangan dilihat dari aspek Rasio efisiensi keuangan daerah, Rasio belanja modal dan Investasi pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di kota Batam periode Tahun 2010 sampai 2015.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
3. Bagaimanakah investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah dilihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah, rasio belanja modal dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengeruh kinerja keuangan daerah di lihat dari aspek rasio efisiensi keuangan daerah, rasio belanja modal dan investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam, adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

2. Aspek praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai bahan belajar dalam pemecahan masalah tentang Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Belanja Modal dan Investasi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta sumbangan dalam mengelola serta meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah, Investasi Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi daerah Kota Batam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan referensi serta bahan dalam menindak lanjuti penelitian yang sama serta memperbaiki kekurangan penelitian yang ada sekarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kinerja

Menurut Stephen P. Robbins dalam I Gusti (2010:40) kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Menurut Moehariono (2010:61) pengertian atau definisi kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahap pengendalian kinerja dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing kementerian/lembaga (pada pemerintah pusat), dan pimpinan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (pada pemerintah daerah). sedangkan pada tahap pengukuran, dilakukan perbandingan antara hasil yang direncanakan dan hasil yang sebenarnya (aktual). Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapaisasarannya.

Salah satu panduan pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan ini, pengukuran kinerja meliputi, tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri atas indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Pengumpulan data kinerja untuk indikator *input*, *output*, dan *outcome* dilakukan setiap tahun untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan mutu pencapaian sasaran. Sementara itu pengumpulan data kinerja untuk indikator *benefit* dan *impact* dapat dilakukan pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pada pelaporan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi publik. Akuntabilitas pemerintah dibidang keuangan diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, pemerintah telah menetapkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini telah terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintah.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat di jelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara.

Menurut Rahardjo (2011:29) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, prinsip otonomi dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Agar prinsip otonomi dapat dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab, dapat dinilai atas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga dalam pembahasannya banyak memaparkan mengenai keuangan daerah, penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD dibahas tentang struktur APBD yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan yang

dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan Rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Sedangkan penetapan APBD membahas tentang proses penyampaian rancangan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Bila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut, selanjutnya disampaikan kembali kepada DPRD. Menurut Rahardjo (2010) pelaksanaan APBD ada beberapa pembahasan yang ditetapkan antara lain, yaitu:

1. Penerimaan dan pengeluaran APBD
2. Pengelolaan barang daerah
3. Akuntansi keuangan pemerintah daerah
4. Perhitungan APBD
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah
6. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah
7. Kerugian keuangan daerah

Penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat wajib disampaikan laporan pertanggung jawaban untuk menilai pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Alat untuk mengukur pencapaian kinerja keuangan pemerintah adalah dengan menganalisis rasio APBD.

Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk analisis rasio APBD berdasarkan data keuangan APBD antara lain:

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007:234). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad \text{Rumus 2.1 REKD}$$

Kriteria rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisien	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Sumber : Mahsun (2009:187)

2. Rasio Belanja Modal

Menurut Deddi (2009: 40) belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Nurlan (2008: 48) belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan pembangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rumus untuk menghitung rasio belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{RBM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\% \quad \text{Rumus 2.2 RBM}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

2.1.4 Investasi

Menurut PSAK Nomor 13 Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, investasi adalah suatu asset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Menurut Abdul Halim dalam (Fahmi, 2010:2) investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor-sektor ekonomi (Mafizatun dalam jurnal).

Adapun tujuan dari investasi menurut (Irham, 2010:3) yaitu:

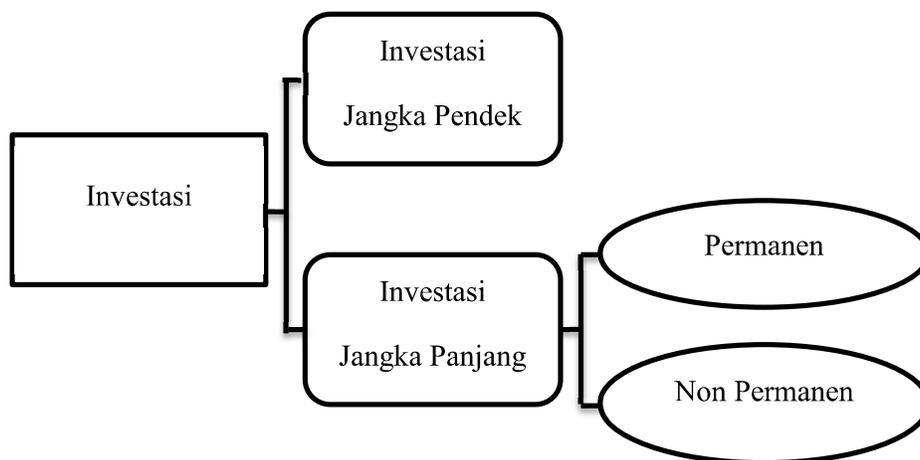
1. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut,
2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*),
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.5 Investasi Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 8 Tahun 2007 Pasal 1 No. 1 investasi pemerintah daerah adalah penetapan sejumlah dana/atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut PSAP 6 mendefinisikan investasi sebagai asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, investasi pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok asset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok asset nonlancar.



Gambar 2.1 Jenis Investasi Pemerintah

1. Investasi Jangka Pendek

Karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu investasi dikategorikan sebagai investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat diperjualbelikan/dicairkan dengan segera.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- c. Berisiko rendah.

Yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito jangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas (12) bulan. Penyertaan modal Pemda, investasi dalam Surat Utang Negara, dan pembelian Obligasi merupakan beberapa contoh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, pelepasan investasi jangka panjang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terkadang juga dilakukan untuk menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

1. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Penyertaan modal dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas (PT) dan nonsurat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
2. Investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Nonpermanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah.
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dialihkan kepada pihak ketiga.
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi oleh pemerintah apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Secara umum, investasi yang diperoleh pemerintah diukur berdasarkan nilai perolehannya. Jika investasi tersebut tidak memiliki nilai perolehan, maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penetapan nilai wajar, sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Dalam investasi pemerintah terdapat metode penilaian investasi jangka panjang pemerintah yang mana dipengaruhi oleh porsi kepemilikan dalam badan usaha investee, yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya kepemilikan investee kurang dari 20%, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas kepemilikan investee berkisar 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%. Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen, dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi adalah untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat (Rahardjo, 2010:26).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu (Iskandar, 2013:411), sedangkan menurut Schumpeter yang dikutip oleh Iskandar (2013:411), pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan.

Aliran klasik membagi teori pertumbuhan ekonomi modern menjadi dua yaitu menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital*), sehingga berdampak pada penekanan aspek penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut model Harrod-Domar dalam Lincoln Arsyad yang dikutip oleh Rahardjo (2010:25), pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat tabungan (investasi) dan Produktivitas kapital (*capital output ratio*). Agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, makin besar investasi dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara/daerah. Sebaliknya makin rendah produktivitas kapital (modal) atau semakin tinggi *capital output ratio*, maka makin rendah pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan sebagai penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”. Menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisiensi, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan besarnya bantuan pusat dan propinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana yang digunakan untuk belanja operasi daripada modal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2014) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Menyatakan bahwa variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Putri Wahyuni, ddk (2014) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali”. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mafizatun Nurhayati (2015) dengan judul “Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Propinsi Tahun 2008-2013. Menyatakan bahwa efek positif pada otonomi fiskal pertumbuhan ekonomi daerah. Efek lokal investasi pemerintah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. pendapatan per kapita dan angkatan kerja daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian Keuangan Daerah • Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah • Rasio Efisiensi • Rasio Keserasian • Rasio Pertumbuhan • Rasio DSCR 	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisiensi, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.
2	Sang Made Muryawan, Made Sukarsa (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal • Fiscal Stress • Kinerja Keuangan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, variabel kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi.

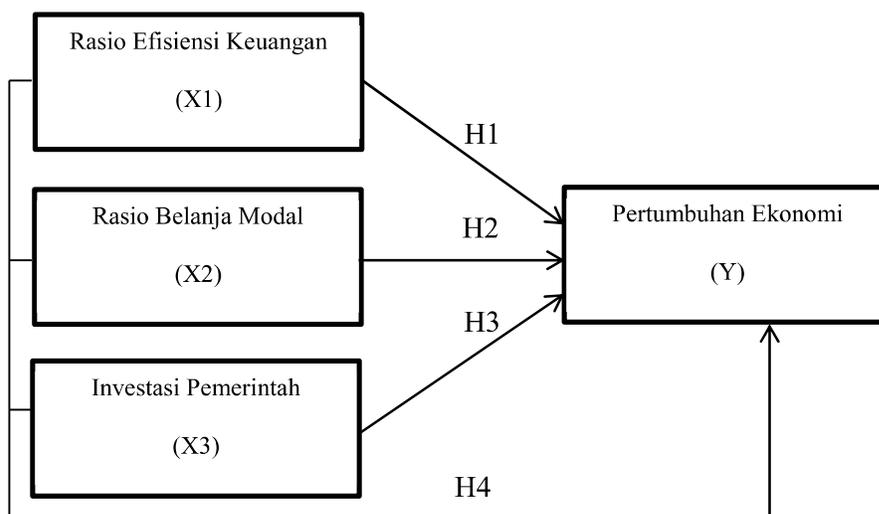
Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
4	I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi (2014)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Investasi Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Kesenjangan Pendapatan 	pengeluaran pemerintah dan investasi dari tahun 2000-2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan kab/kota di Provinsi Bali.
5	Mafizatun Nurhayati (2015)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Propinsi Tahun 2008-2013	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Fiskal • Investasi Daerah • Pendapatan per Kapita • Angkatan Kerja Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	Efek positif pada otonomi fiskal pertumbuhan ekonomi daerah. Efek lokal investasi pemerintah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. pendapatan per kapita daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Angkatan kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan system pemerintahan daerah. kemajuan suatu daerah dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah serta investasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam sebuah model dibawah ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang dicari atau ingin dipelajari. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Rasio efisiensi keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H₂ : Rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H₃ : Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

H₄ : Rasio efisiensi keuangan pemerintah, rasio belanja modal, dan investasi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research* yang merupakan gabungan dari kata *re* dan *search* artinya mengulangi kembali atau mencari berulang kali. Menurut Ma'ruf (2015: 11) penelitian adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang biasa dilakukan untuk mengetahui, membuktikan, atau menguji kebenaran tentang sesuatu.

Menurut Ma'ruf (2015: 28) desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil penelitiannya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari hipotesis dan implikasinya, serta operasional sampai pada analisis akhir. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 51), desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan desain penelitian.

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:96).

Secara umum ada 5 macam variabel dalam penelitian. Namun pada penelitian kali ini, peneliti hanya menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen:

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2009: 33), yaitu:

1. Rasio efisiensi keuangan daerah (X_1) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
2. Rasio belanja modal (X_2) menggambarkan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.
3. Investasi pemerintah daerah (X_3) adalah penetapan sejumlah dana/atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Batam (Y). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu (Iskandar, 2013:411).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kab/Kota Batam yaitu Anggaran dan Realisasi APBD serta Laporan Neraca Kota Batam Tahun Anggaran 2010-2015 atau selama 72 bulan dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Batam Tahun 2010-2015 atau selama 72 bulan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu,

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel yang representative adalah *purposive sampling*, dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi atau diantara sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti, berdasarkan kriteria tertentu seperti: jumlah realisasi pendapatan, jumlah realisasi belanja, jumlah realisasi belanja modal, jumlah investasi jangka panjang, tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan jumlah sampel sebanyak 72.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu menemukan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data yang didapat dari dokumentasi adalah data sekunder dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti (Adhiantoko,2013: 46). Data penelitian yang diambil yaitu data yang di *publish* oleh Pemerintahan Kota Batam dan Kantor BP Batam tahun 2010-2015.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness/kemencengan distribusi (Ghosali, 2016:19).

Statistik deskriptif dalam penyajian data biasanya berupa grafik atau tabel untuk menjelaskan data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Priyatno (2012: 143), model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut asumsi klasik. Tujuan harus terpenuhinya asumsi klasik ini adalah untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Wibowo (2012: 61) uji normalitas ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*.

Menurut Ghozali (2016) langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian multivariate adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah ada distribusi normal atau tidak antar variabel dependen dan variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak yaitu analisis grafik histogram, *linear regression plots* jika berdistribusi normal garis data rill mengikuti garis diagonal, dan melalui uji statistik dilakukan dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada *One-*

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, jika *asyp. sig* > 0,05 maka data yang diuji berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016: 103). Untuk mengetahui adanya *multikolinieritas* atau tidak dengan pengujian nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF), dengan klasifikasi bahwa jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, kesimpulannya tidak ada *multikolinieritas* antara variabel independen dalam model regresi. Dan jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, kesimpulannya ada *multikolinieritas* antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan tujuannya kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai untuk prediksi.

Menurut Sunyoto (2011: 92) salah satu ukuran yang digunakan dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)

2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$.
3. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW diatas +2 atau $DW \geq +2$

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, sedangkan jika variansnya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Sunyoto, 2011: 82).

Analisis uji heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (Sunyoto, 2011: 83). jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali: 2016, 134).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen, dan penggunaan model regresi ini akan memberikan hasil yang baik jika dalam model tersebut memiliki syarat yang sudah terpenuhi yaitu skala interval atau rasio, data yang

berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi klasik (Wibowo: 2012:126). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kinerja keuangan pemerintah dalam hal rasio efisiensi keuangan daerah dan belanja modal serta investasi pemerintah daerah terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Dibawah ini adalah model penelitian untuk variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

$$P = \beta_0 + \beta_1(\text{REKD}) + \beta_2(\text{RBM}) + \beta_3(\text{INV P}) + \varepsilon$$

Rumus 3.1 Analisis Regresi

Keterangan:

P = Pertumbuhan ekonomi

REKD = Rasio efisiensi keuangan daerah

RBM = Rasio belanja modal

INV P = Investasi pemerintah

ε = Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah dugaan sementara peneliti terhadap masalah yang masih akan diteliti untuk dibuktikan kebenarannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dengan menguji sebagai berikut:

3.5.4.1 Uji t

Menurut Priyatno (2011: 52), uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas.

H_a : Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Pengujian t test dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel dengan signifikan dibawah 5% (0,05), maka secara parsial atau individual variabel bebas berhubungan signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan t hitung $<$ t tabel maka secara parsial variabel bebas tidak berhubungan signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.4.2 Uji F

Menurut Priyatno (2013: 122), uji F untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian F dilakukan dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} pengujian simultan menggunakan tingkat signifikan 5% (0,05). Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas dan angka pada F_{tabel} yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikan $<$ 0,05, angka $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila probabilitas signifikan $>$ 0,05, angka $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013: 120).

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai (R^2) = 0, menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila (R^2) semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan (R^2) semakin kecil mendekati 0 maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Pemerintahan Kota Batam Jl. Engku Puteri No. 1 Batam Center-Batam melalui situs resminya www.batamkota.go.id dan BP Batam melalui situs resminya www.bpmatam.go.id.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Perumusan judul	■				
2	Pengajuan proposal skripsi	■				
3	Penyusunan bab I dan bab II		■			
4	Revisi bab I dan bab II		■			
5	Penyusunan bab III			■		
6	Revisi bab III			■		
7	Pengambilan data			■		
8	Penyusunan bab IV dan bab V				■	
9	Revisi bab IV dan bab V				■	
10	Penyerahan softcover ke BAK					■